

**TESIS**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DALUWARSA  
SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN  
(SP3) DALAM PERSPEKTIF PRA PERADILAN**



**Diajukan oleh**

**GUNAWAN HADI SAPUTRA**

**NIM. 2320215310172**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**



**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DALUWARSA SURAT  
PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM  
PERSPEKTIF PRA PERADILAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh  
GUNAWAN HADI SAPUTRA  
NIM. 2320215310172**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis : Kepastian Hukum Terhadap Daluwarsa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perspektif Pra Peradilan**

**Nama : Gunawan Hadi Saputra**

**NIM : 2320215310172**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.  
NIP. 19810626 200604 1 006**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**

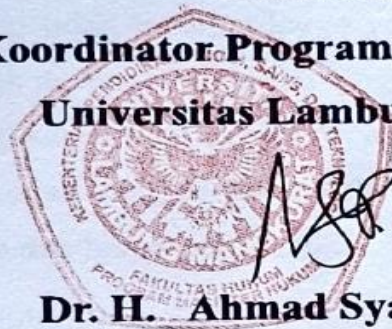


**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**Nip. 19810626 200604 1 006**

**Disahkan Oleh**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**

**Nip. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**Nip. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Hadi Saputra

NIM : 2320215310172

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 18 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Gunawan Hadi Saputra

NIM. 2320215310172

Tesis ini telah dipertahan  
Di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 22 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

## **MOTO**

Kegagalan hanya akan terjadi bila kita menyerah

**(BJ. Habibie )**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta Ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

### **BAPAK DAN IBU TERKASIH**

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Bapak Sugianto** dan **Ibu Sarti** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

### **KAKAK DAN ADIKKU**

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Ratna Dwi Susanti, Yuni Sulistiani** dan Adikku tersayang **Noor Widya Arianti** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

### **DOSEN PEMBIMBING TESIS**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Saputra, Gunawan Hadi. 2025. Kepastian Hukum Terhadap Daluwarsa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perspektif Praperadilan. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 100 halaman.

## RINGKASAN

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan serius, khususnya ketika tindakan bela diri oleh korban justru berujung pada proses pidana dan di jadikan tersangka karena menyebabkan kematian pelaku. Meskipun akhirnya penyidikan dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tindakan tersebut memunculkan polemik mengenai dasar hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif. SP3, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam KUHAP, sering digunakan penyidik sebagai diskresi dalam penghentian penyidikan, yang dalam praktiknya berpotensi disalahgunakan. Praperadilan sebagai mekanisme kontrol atas sah atau tidaknya SP3 menjadi penting dalam menjamin akuntabilitas penyidik dan perlindungan hak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal doctrinal research*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menjawab isu hukum terkait. Jenis penelitian yang dipakai adalah *reform-oriented research*, yakni penelitian hukum yang bertujuan memberikan rekomendasi perubahan hukum. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diolah melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

SP3 dapat diterbitkan penyidik jika terdapat alasan hukum, penerbitan SP3 harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan SP3, yaitu untuk menguji keabsahan keputusan penyidik, khususnya jika keluarga korban merasa SP3 diterbitkan secara tidak sah atau tidak adil. Keseimbangan hukum pidana diperlukan agar tidak hanya melindungi hak tersangka tetapi juga memastikan hak korban atas kejelasan dan kepastian hukum. Ditekankan pentingnya reformasi pengaturan dan implementasi SP3 serta mekanisme praperadilan guna memperkuat keadilan, kepastian hukum peradilan di Indonesia.

KUHAP hingga saat ini belum mengatur tentang batas waktu pengajuan praperadilan terhadap terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), KUHAP hanya mengatur batas waktu hakim memutus (7 hari sejak sidang pertama). Kekosongan hukum ini menciptakan multitafsir dan ketidakpastian, sehingga berpotensi merugikan korban secara prosedural. Dan ketidak tenangan tersangka akibat ketidakjelasan tenggang waktu pengajuan praperadilan oleh korban, sehingga menyebabkan hilangnya akses keadilan dan membuka peluang penyalahgunaan proses hukum.

Saputra, Gunawan Hadi. 2025. Kepastian Hukum Terhadap Daluwarsa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perspektif Praperadilan. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, 100 halaman.

## ABSTRAK

**Kata Kunci:** SP3, Praperadilan, Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan serius, khususnya ketika tindakan bela diri oleh korban justru berujung pada proses pidana dan di jadikan tersangka karena menyebabkan kematian pelaku. Meskipun akhirnya penyidikan dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tindakan tersebut memunculkan polemik mengenai dasar hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif. SP3, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam KUHAP, sering digunakan penyidik sebagai diskresi dalam penghentian penyidikan, yang dalam praktiknya berpotensi disalahgunakan. Praperadilan sebagai mekanisme kontrol atas sah atau tidaknya SP3 menjadi penting dalam menjamin akuntabilitas penyidik dan perlindungan hak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal doctrinal research*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menjawab isu hukum terkait. Jenis penelitian yang dipakai adalah *reform-oriented research*, yakni penelitian hukum yang bertujuan memberikan rekomendasi perubahan hukum. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diolah melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif.

Pertama, penerbitan SP3 oleh penyidik memang sah sah saja namun harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Praperadilan berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap keabsahan SP3, terutama jika dirasa merugikan pihak korban. Kedua, di KUHAP maupun PERMA belum mengatur batas waktu pengajuan praperadilan terhadap SP3, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekosongan ini dapat membuka peluang penyalahgunaan wewenang penyidik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengaturan dan penegakan hukum terkait SP3 dan praperadilan guna memperkuat keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

*Saputra, Gunawan Hadi. 2025. Legal Certainty Concerning the Expiration of the Order to Terminate Investigation (SP3) from a Pretrial Perspective. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., 100 pages.*

## **ABSTRACT**

**Keywords:** *SP3, Pretrial, Legal Certainty*

*Indonesia, as a state governed by law, faces serious challenges, particularly when acts of self-defense by victims result in criminal prosecution and the victim is named a suspect for causing the perpetrator's death. Although the investigation may be terminated through the issuance of a Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), such action raises controversy regarding its legal basis, legal certainty, and substantive justice. While not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), SP3 is often used at the discretion of investigators, which in practice may lead to abuse of power. Pretrial proceedings serve as a control mechanism to assess the legality of SP3 and safeguard individual rights and the accountability of law enforcement.*

*This study employs normative legal research (legal doctrinal research) using a prescriptive-analytical approach, with statutory, conceptual, and case approaches to examine the related legal issues. The research is reform-oriented, aiming to propose legal changes. Data sources include primary legal materials (statutes and court decisions), secondary materials (legal literature), and tertiary materials (legal dictionaries). Data were collected through literature study and analyzed qualitatively through inventory, classification, systematization, and interpretation to produce logical and argumentative legal conclusions.*

*First, while investigators are authorized to issue SP3, it must be done with caution and responsibility to avoid injustice to victims. Pretrial serves as a supervision mechanism for the validity of SP3, especially when perceived as detrimental to victims. Second, neither KUHP nor Supreme Court Regulations (PERMA) currently regulate the time limit for submitting pretrial motions against SP3, resulting in legal uncertainty. This legal vacuum may lead to procedural abuse. Therefore, reform in the regulation and implementation of SP3 and pretrial mechanisms is necessary to strengthen justice and legal certainty in Indonesia.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Daluwarsa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perspektif Praperadilan” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum pidana;
6. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
7. terimakasih juga teruntuk kamu Sucitra Fikriani (**cutie pie ku**) yang sudah mau bertahan dan menemani perjuangan dan usahaku sampai tesis ini pada akhirnya bisa selesai.
8. terimakasih atas semangat dan dukungnya teman-teman seperjuangan yang tak pernah berhenti memberikan support, bantuan, bimbingan dan motivasinya Khairil Isra, Marshela Rafa Rorie, M. Rezamil Aditya Rahman, Ade Ahda Nabila dan M. Fajari selama perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini;
9. terimakasih juga untuk Akhmad Saripudin yang telah memberikan dorongan dan support sehingga tesis ini dapat selesai di semester ini;

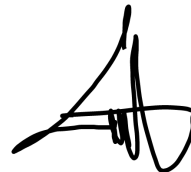
10. terimakasih teman pejuang SHP dan Sidang Tesis, M. Hasanul Arifin dan Norhidayah yang membantu perevisian;
11. terimakasih kepada teman-teman LBH Borneo Nusantara BJB MTP Huda Kusuma Wardana, M. Rizki Maulana, Ati Nisaun Nadhirah, Ferda De Cholina, Laelani Yesmetha dan Anugrah Safitri yang selalu memberikan semangat dan tempat berbagi cerita di kantor.
12. serta terimakasih banyak seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Peneliti



**GUNAWAN HADI SAPUTRA**

**NIM. 2320215310172**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN .....	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	11
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Tinjauan Teoritis .....	12
2. Tinjauan Konseptual .....	26
F. METODELOGI PENELITIAN .....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Tipe Penelitian .....	36
3. Pendekatan Penelitian .....	36
4. Sifat Penelitian .....	38
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	38
6. Teknik Pengumpulan Bahan .....	39
7. Pengolahan dan Analisis Bahan .....	40
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	41
BAB II MEKANISME PENGATURAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) .....	43

A. Tugas Dan Wewenang Penyidik Kaitannya Dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).....	43
B. Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) .....	59
BAB III ___ ATURAN DALUWARSA PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH KORBAN ATAU KELUARGA KORBAN SETELAH ADANYA SP3 .....	69
A. Peran Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).....	69
B. Pengaturan Daluwarsa Pengajuan Praperadilan Oleh Korban Atau Keluarga Korban .....	84
BAB IV ___ PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	